



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
UNIT KERJA : DIREKTORAT MANAJEMEN STRATEGIS DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDWAN
2. Jabatan : DIREKTUR EKSEKUTIF
3. NHK : 434082

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.640.666.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m²/190 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
2. Tanah Seluas 1667 m² di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 690.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/130 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.666.000
4. Tanah Seluas 600 m² di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.184.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 83.000.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. 18.347.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.731.558.614

F. HARTA LAINNYA

Rp. 1.895.056.007

Sub Total

Rp. 11.552.627.621



III. HUTANG

Rp. 1.724.131.679

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.828.495.942

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.